

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. kualitas laporan keuangan dikatakan akuntabilitas jika dapat memenuhi empat karakteristik laporan keuangan yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).
2. Aksesibilitas adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Aksesibilitas dalam laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan

dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah.

3. akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
4. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y), karena variabel kualitas laporan keuangan daerah nilai tingkat signifikan ( $0,01 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} (8,876) > t_{tabel} (1,98)$ . Sedangkan variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah nilai tingkat signifikan ( $0,04 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} (2,926) > t_{tabel} (1,98)$ .
5. Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa variabel independen (kualitas laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) ) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y), karena nilai sig. ( $0,001 \leq \alpha (0,05)$ ) dan  $F_{hitung} (74,367) > F_{tabel} (1,98)$ .

6. Berdasarkan pada output model summary diatas, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,639 atau 63,9% yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2) sebesar 63,9%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 63,9\% = 36,1\%$ ) didukung oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang, berkaitan dengan kualitas laporan keuangan daerah memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka disarankan agar dalam mengerjakan program-program yang telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada agar tercapai tujuannya dan kemudian dapat diungkapkan informasi keuangannya sesuai dengan realita yang ada dengan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.
2. Bagi Pemerintah Kota Kupang, berkaitan dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka disarankan Pemerintah Kota Kupang dapat mempertegas kembali aturan mengenai pengelolaan keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya peraktek KKN yang sangat berpengaruh besar terhadap pengungkapan informasi keuangan.

3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti menambahkan atau mengganti variabel yang diteliti dengan variabel lain, karena dalam penelitian ini hanya mengambil variabel kualitas laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan daerah sebagai variabel independen. Diduga terdapat variabel-variabel lain yang dapat dihipotesiskan sebagai variabel independen maupun ditambah variabel moderisasi yang dapat mempegaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## Daftar pustaka

- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit. Erlangga: Jakarta. Halim, A, Damayanti, T.2007.
- Erlina dkk. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI. Edisi Pertama*. Jakarta
- Fauziah. (2017). *Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, edisi 4. BP-UNDIP. Semarang.
- Hafzan Fikrian. (2017). *Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. JOM Fekon, Vol. 4. No. 1.
- Ika Subekti. (2015). *Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah kota Banjarmasin*
- Mahmudi. (2010). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan perangkat Daerah Kabupaten Jember)*
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muhamad Rizafadli. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Kaporan Keuangan dan Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan*
- mulyana. (2006). *Pengaruh Kualitas, Penyajian, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang*.
- Nurmuthmainnah. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.
- Rezky Darbianda. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang*.

- Riyansa, dkk. (2015). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Sande. (2003). *Permendagri no.13 Tahun 2006*
- Saputri, Selviana Mega Ayu. (2020). *Partisipasi Masyarakat, pemahaman, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa kecamatan sentolo, Kulon progo*.
- Sarwono. (2013). *Analisis statistik inferensial*.
- Septa Purwaningrung. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo*.
- Siregar. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif : dilengkap dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Sugoyono. (2010). *Statistika untuk penelitian*. Bandung.
- Superdi. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD Kabupaten Sijunjung)*.
- Widhiarso. (2010). *Membuat Kategori Skor Hasil Pengukuran Dari Skala*.
- Zata Zainina Amalina. (2018). *Pengaruh Kualitas, Penyajian, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (studi empiris pada SKPD BKD Kota Batu)*.
- Hasil opini BPK untuk LKPD Kota Kupang 2016. <https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/12/Pemkot-Kembali-Raih-Predikat-WDP-ketua-DPRD-Tahun-Depan-Wajib-WTP.pdf>.
- Hasil opini BPK untuk LKPD Kota Kupang 2017. <https://ntt.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/03.-siaran-pers-penyerahan-LPH-LKTD-TA-2017-Kota-Kuoang.pdf>
- Hasil opini BPK untuk LKPD Kota Kupang 2018. <https://ntt.bpk.go.id/bpk-perwakilan-provinsi-ntt-serahkan-lph-lkpd-ta-2018-kepada-enam-kabupaten-kota/>
- Hasil opini BPK untuk LKPD Kota Kupang 2019. <https://ntt.bpk.go.id/bpk-memberikan-opini-wtp-untuk-lkpd-ta-2019-pemerintah-kota-kupang-dan-kabupaten-nagakeo/>
- Hasil opini BPK untuk LKPD Kota Kupang 2020. <https://ntt.bpk.go.id/bpk-memberikan-opini-wtp-untuk-lkpd-ta-2020-pemerintah-kota-kupang-dan-kabupaten-timor-tengah-selatan/>

Peraturan Pemerintah Dalam Negri (PEMENDAGRI ) Nomor 3 Tahun 2017  
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  
Kementrian Dalam Negri Dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan neagara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi  
Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah  
Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Tentang Standar Akuntansi  
Pemerintah.